

Daftar Isi

Image and the Veil: A Barthesian Reading of Veiled Muslim Women Diah Ariani Arimbi	189–194
Peran Politik Perempuan dalam Sistem Matrilineal di Minangkabau, Sumatera Barat Nurwani Idris	195–205
Peranan Perempuan dan Pembangunan di Indonesia Benny Ferdy Malonda	206–218
Makna Seksualitas bagi Akseptor Tubektomi Subagyo Adam	219–224
"Mappasikarawa" dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Wajo Paisal.....	225–231
Mencari Partai Politik Ber-Platform Pembangunan Pedesaan Dwiyanto Indiahono	232–235
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Lamongan Roestoto Hartojo Putro	236–242
Anteseden Rasa Saling Percaya dan Kerja Sama Cerdas dalam Tataan Budaya Kolektivistik untuk Membangun Modal Sosial dan Modal Intelektual Siti Sulasmi	243–250
Pemasaran pada Pemerintah Lokal Mas Roro Lilik Ekowanti	251–258
Bencana Tsunami dan Stres Pasca-Trauma pada Anak Nurul Hartini	259–264
Perilaku Penemuan Informasi Mahasiswa FISIP dan Fakultas Farmasi Unair dalam Proses Penulisan Skripsi Agus Santoso.....	265–273

Makna Seksualitas bagi Akseptor Tubektomi

Subagyo Adam¹

Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRACT

This article explores sexual perception of women who have decided to become permanent acceptor of tubectomy method in family planning. It has focused on how women express their feelings about sexuality in deciding to have a tubectomy surgery. The original research of this article used qualitative methodology with Blumer's 'meaning' framework and also applied an ontological side that sees the problem within its natural context..

Key words: tubectomy, meaning, sexuality, power

Konstruksi protagonis perempuan yang telah terajut lama dalam masyarakat meliputi dua sisi, yaitu antara peran reproduksi dan seksualitas, yang keduanya tidak dapat direduksi apalagi terpisahkan. Tubuh perempuan selain sebagai sasaran target di bidang fertilitas dengan jalan menjadi akseptor Keluarga Berencana (KB) dimuati pula oleh 'modal simbolik', yang dianggap mempunyai kekuatan pesona (rangsangan, hasrat, dan citra) yang dikemas dalam seksualitas. Oleh karena itu, dalam memilih pemakaian cara kontrasepsi (sebagai akseptor tubektomi), sebenarnya mereka senantiasa mempertimbangkan pula aspek seksualitas.

Dua jenis kelamin manusia perempuan dan laki-laki masing-masing mempunyai keterbatasan reproduksi yang lazim disebut kodrat. Laki-laki sebagai penghasil sperma dan perempuan 'dianggap' mempunyai risiko mengandung karena ada rahim. Pemikiran yang stereotipikal ini telah mengaburkan suatu kebenaran asumsi, bahwa sebenarnya perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap peluang-peluang terjadinya kehamilan. Tetapi, pemikiran tersebut terus direproduksi dan dianggap suatu kebenaran oleh suatu konstruksi kekuasaan sehingga dalam hubungan gender yang timpang perempuan senantiasa harus memikul beban, yaitu memakai alat kontrasepsi.

Fenomena yang tipikal tentang pemakaian cara kontrasepsi ini tentu menimbulkan pertanyaan, di samping mengapa laki-laki membiarkan perempuan terus mencari alat kontrasepsi yang diinginkan, bagaimana sesungguhnya perempuan berhadapan

dengan laki-laki ketika akan memutuskan KB. Selain itu, timbul permasalahan terhadap pembagian jenis kelamin dalam pemakaian alat kontrasepsi ini. Bukankah fertilitas yang diukur melalui jumlah kelahiran bayi hidup merupakan tanggung jawab perempuan dan laki-laki? Sementara, masih perlu ditelaah kembali mengapa tubuh perempuan dikorbankan demi pembangunan? Untuk suatu penelaahan kritis, perlu dicermati pemikiran Illich (1982) tentang 'perempuan' dan hakikat 'ketertindasan' mereka.

Ketertindasan perempuan dapat dijelaskan melalui hubungan hierarkis yang berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki sebagai suatu kategori sosial mendominasi kaum perempuan sebagai kategori sosial yang lain. Karenanya, laki-laki diuntungkan dengan adanya subordinasi perempuan. Dominasi laki-laki atau subordinasi perempuan ini, menurut mereka merupakan suatu model konseptual yang bisa menjelaskan berbagai bentuk penindasan yang lain. Jaguar (1983) menyebutkan bahwa menurut aliran ini 'jenis kelamin seseorang adalah faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan posisi sosial, pengalaman hidup, kondisi fisik dan psikologis serta kepentingan dan nilai-nilainya'. Atas dasar argumentasi ini, muncul slogan '*the personal is political*' (yang pribadi adalah politis). Maksudnya, karena dominasi laki-laki bukan hanya di arena publik tetapi juga di arena kehidupan pribadi, maka perjuangan perempuan untuk menghapuskan subordinasi tidak hanya di luar rumah, tetapi dimulai di dalam rumah. Jadi, misalnya persoalan 'siapa yang

¹ Korespondensi: S. Adam, Departemen Sosiologi, FISIP, Unair. Jl. Airlangga 4-6, Surabaya 60286. Telp: 031-5011744. E-mail: sadam_fisip@unair.ac.id.

melakukan kerja rumah tangga, atau siapa yang menginterupsi siapa dalam pembicaraan sehari-hari, dilihat sebagai bagian dari sistem dominasi laki-laki.

Norma yang mengatur seksualitas adalah cermin dari perilaku, bahwa laki-laki dianggap lebih dominan dorongan seksualnya, sedangkan perempuan lebih pasif dan represif. Karena itu, laki-laki yang meminang, bukan perempuan. Laki-laki dianggap poligam sehingga lumrah kalau menyeleweng. Perempuan dianggap monogam sehingga kalau menyeleweng dianggap aib karena berusaha meniru kecenderungan poligamis laki-laki. Seksualitas manusia diarahkan dan bahkan diberi struktur yang kaku, misalnya konsep aurat, perkawinan, dan paham-paham 'kepantasan' pergaulan laki-laki dan perempuan. Bahkan, terdapat budaya yang melakukan pemotongan secara fisik seperti *clitoridectomy* dan infibulasi untuk mengendalikan seksualitas perempuan (Suryakusuma 1981).

Kajian ini tidak mengarah pada usaha dekonstruksi, tetapi lebih menempatkan perempuan sebagai subjek yang memiliki pendapat, sikap dan cita-cita tentang diri sendiri maupun dunia di luar mereka; yang terutama ungkapan perasaan mereka terhadap seksualitas dalam pengambilan keputusan operasi tubektomi.

Metode dan Fokus Kajian

Tulisan ini mengkaji persepsi seksualitas bagi perempuan yang telah mengambil keputusan sebagai akseptor KB mantap tubektomi. Sementara, aras kualitatif dari kajian ini berangkat dari kerangka pemikiran *meaning* Blumer (1986) dan menerapkan segi ontologik dengan penglihatan permasalahan dalam konteks natural dan bukan parsial (Spradley 1980 & Muhadjir 1992). Pengambilan sampel secara *purposeful sampling*, yaitu memilih informan yang dapat membantu pengembangan, ditempuh melalui: 1) menjalin rasa simpati antara peneliti dengan akseptor tubektomi dan tidak hanya penggalan yang bersifat deskriptif (hanya mengajukan pertanyaan deskriptif), tetapi juga menghindarkan kesan menilai (lebih-lebih yang tidak sejalan dengan pandangan informan); 2) menciptakan visibilitas saling bekerja sama sehingga peneliti sudah dapat menjajaki minat, perhatian dan aspek-aspek permasalahan tubektomi; 3) menumbuhkan rasa saling percaya dan menghilangkan rasa saling curiga antara peneliti dan informan. Masing-masing telah saling memahami apa yang menjadi minat dan harapan timbal balik di antara kedua belah pihak; merasa saling gairah

dengan kegiatan wawancara yang berlangsung. Informan telah menunjukkan sikap kooperatif dalam membeberkan informasi yang diperlukan peneliti; 4) menempatkan informan yang dalam hal ini disebut sampel juga sebagai guru atau narasumber bagi peneliti sehingga informan tidak lagi hanya menjawab pertanyaan.

Segi ontologik metode ini melihat permasalahan dalam konteks natural, bukan parsial. Studi ini berangkat bukan dari penggunaan teori (epistemologi metode ini berbeda dengan landasan positivisme) sebagaimana lazimnya penelitian yang berlandaskan positivisme. Membuat persiapan lebih dahulu bisa terjerumus pada produk artifisial yang jauh dari sifat naturalnya. Informan yang berterus terang, mampu berkomunikasi secara lancar, serta kesediaannya membantu studi ini, merupakan aras epistemologi dalam penelitian ini.

Sementara, fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana perempuan mengungkapkan perasaannya mengenai seksualitas (*told coersif story*) dalam pengambilan keputusan operasi tubektomi? Penelitian ini berlandaskan pada pemikiran Merton (1967) bahwa individu dibentuk oleh struktur sosial di mana mereka hidup. Tetapi, gambaran tentang manusia tersebut bukanlah merupakan suatu determinisme yang kaku; karena ada pola-pola perilaku yang merupakan bagian dari aturan institusional, dan ada juga alternatif-alternatif (yang memungkinkan volunterisme pada pihak para anggota masyarakat). Di dalam melakukan tindakannya, individu memiliki beberapa pilihan, namun alternatif ini secara sosial dimantapkan oleh tuntutan-tuntutan normatif. Dalam hal ini, tindakan individu (aktor) dipandang sebagai orang yang membuat pilihan dalam situasi sosialnya. Demikianlah perempuan memakai cara kontrasepsi tubektomi berdasar pada keinginan dan perasaannya.

Sementara itu, walau berbagai individu yang terlibat dalam situasi akan memperoleh aturan-aturan yang telah ditetapkan, namun pada situasi tertentu mereka memiliki otonomi. Hal ini bisa dijelaskan bahwa peraturan-peraturan tersebut dalam setiap *setting* interaksi berbeda satu dengan yang lain sehingga tidak dapat memperlakukan satu peraturan untuk setiap *setting*. Dalam setiap situasi, setiap individu menangkap aturan-aturan interaksi yang dianggap berlaku dalam situasi tertentu. Di sini, individu bertindak melalui proses berpikir dan menilai kesesuaian tindakan atas makna objek sehingga memengaruhi proses pengambilan keputusan. Proses tersebut oleh Blumer (1969) dikatakan sebagai *self*

indication, yang dalam konteks sosial adalah proses komunikasi di mana individu mengetahui sesuatu, menilai, memberikan makna dan memutuskan berdasar makna-makna itu.

Diskusi Teoretik

Seks adalah faktor utama yang mendefinisikan manusia, yaitu perempuan, laki-laki dan kedewasaan. Aspek ini terus memengaruhi seseorang sepanjang hidupnya dan cenderung didorong melihat diri dari segi seks masing-masing. Seksualitas menjadi inti dari seseorang. Di antara beberapa atribut manusia seperti ras, kebangsaan, kesukuan, agama, umur, pekerjaan; seks merupakan salah satu identitas paling mendasar. Dalam uraian lebih singkat, seksualitas mampu mendefinisikan manusia secara pribadi, sosial dan moral. Seksualitas bukan hanya sesuatu yang biologis fisik, tetapi selalu merupakan suatu bentuk interaksi sosial. Karena itu, hubungan seksual adalah refleksi nilai-nilai masyarakat, adat, agama, lembaga besar seperti negara, dan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Weeks 1981).

Kebutuhan seksual pada tataran tertentu sering kali dibandingkan dengan kebutuhan makan dan minum. Sama dengan kebutuhan makan, kegiatan seksual diekspresikan dan diatur secara sosial. Jika kebutuhan biologis makan sudah berkembang sampai tingkat gastronomi, etiket dan ritual, demikian halnya dengan seksualitas yang cara ekspresinya diatur oleh moralitas, tabu, upacara, serta peraturan-peraturan masyarakat. Perlu diingat juga, meskipun semua masyarakat merasa perlu mengatur kehidupan erotis warganya, apa yang didefinisikan sebagai 'seksualitas' dalam isi maupun implikasi berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, atau dalam masyarakat yang sama tetapi dalam periode sejarah yang berbeda (Weeks 1981 & Rubin 1984).

Potensi seksual telah diintegrasikan dalam serangkaian luas konteks sosial, dari hubungan pedagogis ke ritus pubertas, dalam kultus kesuburan sampai upacara keagamaan. Ada beberapa budaya yang bahkan tidak melihat hubungan antara persetubuhan dan pembuahan, tetapi ada juga yang melihat pembuahan sebagai satu-satunya pembenaran untuk melakukan persetubuhan. Ada budaya yang membuat pembedaan kecil antara hubungan heteroseksual dan homoseksual, dan lebih memusatkan perhatian pada usia atau golongan sosial lawan jenis. Dalam beberapa budaya, hubungan seksual merupakan sumber kesenangan,

dan kunci pada pemujaan seni erotis; dalam budaya lain merupakan sumber bahaya, tabu dan aib. Pelepasan atau penggunaannya secara benar dapat menjadi faktor kesehatan, kekuatan, dan aktivitas; pengekangannya adalah sumber penyakit, kelainan sosial, bahkan penyakit jiwa (Weeks, 1981).

Rubin (1984), juga menerangkan bahwa seksualitas di samping bersifat relasional, juga merupakan kategori sosial, seperti halnya kelas, gender dan agama, yang mampu memberi seseorang status dan peran. **Implikasi status dan peran adalah batasan dan kontrol yang dapat dipakai untuk mengontrol individu dalam masyarakat.** Jadi, antara gender dan seksualitas mempunyai persamaan yang keduanya mempunyai basis biologis pada seks dan merupakan konstruksi sosial yang bersifat politis dan terjalin rapi melalui sistem kekuasaan.

Seksualitas sendiri merupakan studi kasus yang patut dipahami, khususnya yang berhubungan dengan konstruksi sosial. Sebab, seksualitas mempertemukan beberapa aspek kehidupan manusia. Secara psikologis, seks memengaruhi kejiwaan manusia. Secara sosial, seks merupakan cermin dari tata cara pergaulan manusia yang diatur oleh pranata masyarakat. Secara ekonomis, seks mempunyai implikasi mulai dari perkawinan sampai pelacuran; dan dalam era kapitalisme, seks menjadi komoditi yang sangat menunjang lewat media film, televisi dan periklanan. **Secara politis, artikulasi antara gender dan seksualitas menambah dimensi untuk memahami hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.**

Sejarah mencatat, kolonialisme ikut menciptakan konsep seksualitas yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Onghokham (1991) menyebutkan tentang institusi selir pada jaman VOC sesudah masa Coen, di mana hubungan antara orang Belanda dengan pribumi cenderung dibiarkan. Salah satu alasannya adalah sangat sedikit perempuan Belanda yang datang ke Asia sehingga terpaksa diadakan pelonggaran, bahkan anjuran ke arah hubungan seksual antara laki-laki Belanda dengan selir bukan Belanda. Selir-selir yang bukan Belanda ini status atau posisinya lebih mirip 'budak'. Kemudian di masyarakat kolonial timbul pranata Nyai, yaitu perempuan yang dipelihara oleh pejabat kolonial atau swasta-swasta Belanda yang kaya. Perlu dicatat bahwa institusi Nyai, merupakan lambang romantisme seksual yang memberi kunci bagi suksesnya kolonialisme. Bahkan, kepada orang-orang kaya Belanda yang menetap atau bertugas di Hindia Belanda, dinasehatkan agar secepat mungkin memelihara Nyai sehingga si 'majikan'

dapat mempelajari bahasa dan adat istiadat di 'Timur' dengan cepat.

Kekuasaan atas seks ditetapkan secara merata di segala tataran. Dari atas ke bawah, dalam keputusan global ataupun intervensi sangat halus, apapun peralatan atau lembaga yang menopangnya, kekuasaan bertindak secara seragam dan massal. Kekuasaan berfungsi dengan roda-roda sederhana dan terus-menerus diproduksi oleh hukum, larangan dan sensor. Dari negara sampai keluarga, dari raja sampai ayah, dari peradilan sampai hukuman kecil sehari-hari, dari berbagai instansi dominasi sosial sampai berbagai struktur pembentuk subjek sendiri, dapat dijumpai satu bentuk umum kekuasaan yang hanya berbeda dalam skala.

Bentuk yang dimaksud adalah 'hukum', dengan pasangan halal dan haram, pelanggaran dan hukuman. Apakah diberi bentuk raja yang membuat hukum, atau ayah yang membuat aturan, atau penyensor yang membungkam, atau guru yang mengungkapkan, yang pasti kekuasaan diskematiskan dalam bentuk yuridis dan dampaknya dirumuskan sebagai bentuk kepatuhan. Di hadapan suatu kekuasaan yang merupakan hukum, subjek yang dibentuk dan yang 'ditundukkan' adalah subjek yang patuh. Homogenitas bentuk kekuasaan di segala instansi itu, apakah itu subjek terhadap raja, warga terhadap negara, anak terhadap orang tua, murid terhadap guru, sama dengan bentuk umum kepatuhan. Kekuasaan pembuat undang-undang di satu pihak dan subjek patuh di lain pihak juga terjadi dalam seksualitas.

Foucault (1997) secara mendasar membahas hubungan artikulasi antara seksualitas dan kekuasaan melalui dua aspek, yaitu instansi aturan dan kesatuan perangkat. Kekuasaan di sini bukan sebagai himpunan lembaga dan perangkat yang menjamin kepatuhan warga negara di dalam suatu negara tertentu, dan bukan semacam daya yang terdapat pada beberapa orang. Kekuasaan disebutkan sebagai suatu model strategis yang handal dalam masyarakat tertentu, yang dibentuk oleh kekuasaan-kekuasaan mikro yang terpisah-pisah. Pemahaman tentang kekuasaan harus mengikuti proposisi bahwa kekuasaan bukan suatu yang diperoleh, dirampas atau dibagi, sesuatu yang dibiarkan lolos. Tetapi, kekuasaan berfungsi berdasarkan unsur yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam permainan hubungan yang tak sederajat dan bergerak.

Instansi aturan dan kekuasaan hanyalah apa yang menentukan hukum seks. Artinya, pertama seks ternyata ditempatkan oleh kekuasaan di

bawah sistem biner halal-haram; boleh-terlarang. Kemudian, kekuasaan menentukan bagi seks suatu 'tatanan' yang sekaligus berfungsi sebagai bentuk ketedasan (kejelasan) dan seks diuraikan berdasarkan hubungannya dengan hukum. Sebagai unsur yang terakhir, kekuasaan bertindak dengan mengucapkan aturan. Penguasaan seks dilakukan melalui bahasa atau lebih tepat melalui tindak wacana yang menciptakan karena memang diartikulasikan suatu keadaan *de jure*. Kekuasaan berbicara, dan itulah aturan. Bentuk murni dari kekuasaan dijumpai dalam fungsi pembuat undang-undang, dan caranya bertindak terhadap seks adalah cara yuridis kewacanaan.

Hasil

Unsur pembagian kerja secara gender, yaitu perempuan mempunyai ruang gerak yang 'dianggap' perempuan, menumbuhkan dorongan dalam memilih alat kontrasepsi yaitu operasi steril tubektomi. Kepribadian ini terbentuk dari keutamaan yang merupakan milik sendiri karena ada perbedaan yang tegas dari dua gender. Sifat individual semacam ini merupakan konsekuensi dari kontrak perkawinan yang lebih condong menerapkan hukum restitusif sehingga menumbuhkan kerja sama dalam arti membagi tugas bersama. Apabila pembagian tugas ini mempunyai ciri yang berbeda dalam kualitas, maka pembagian kerja itu disebut pembagian kerja bertingkat atau spesialisasi dalam arti yang sesungguhnya. Sanksi yang dikenakan kepada perempuan jika melakukan pelanggaran sesuai dengan peran gender dengan segala persepsi stereotipe adalah bukan "inilah hukum yang layak kau terima", melainkan "inilah hukum yang berlaku dan harus kau taati".

Di satu pihak, semakin luas pembagian kerja laki-laki dan perempuan, semakin erat pula ketergantungan individu kepada masyarakat. Dengan demikian, beban yang ditanggung menjadi tidak lebih berat karena ada perbedaan beban dari dua gender. Mereka juga mempunyai kesempatan besar untuk berinisiatif, seperti tuturan berikut:

"Pada awalnya saya sendiri memang ingin operasi steril (tubektomi), kemudian saya beritahukan rencana saya kepada suami. Orang laki-laki memang harus bekerja dan kasihan nanti kalau operasi steril (vasektomi) dapat menjadi lemas dan mengganggu kewajibannya sebagai kepala rumah tangga."

Sebenarnya arti seksualitas perempuan tidak seharusnya dipersempit sampai hanya tersisa fungsi reproduksinya. Dalam pengambilan keputusan di bidang reproduksi yaitu sebagai akseptor tubektomi, perempuan senantiasa tidak dapat mengeliminasi seksualitas. Ungkapan seksualitas yang ter subordinasi diutarakan oleh informan sebagai berikut:

"Lebih baik saya melakukan steril daripada orang laki-laki (suami). Sayang apabila nanti operasi steril suami kesehatannya (seksualitasnya) menjadi terganggu sehingga tidak bisa memberikan keturunan. Tambahan lagi, kalau saya meninggal dia tidak bisa punya anak dengan isteri yang baru."

Bahwasanya memang tidak ada bidang tertentu dalam seksualitas yang berasal dari suatu pengetahuan ilmiah, tanpa pamrih dan bebas di samping sifatnya yang imanen. Memang, seksualitas terbentuk sebagai bidang yang harus diketahui, tetapi itu berdasarkan hubungan-hubungan kekuasaan yang telah membentuknya sebagai objek yang mungkin dikaji melalui wacana tentang seksualitas. Sebaliknya, jika kekuasaan telah mampu menggunakan seksualitas sebagai sasarannya, itu karena berbagai teknik pengetahuan dan prosedur wacana yang telah merasuki seksualitas.

Bentuk-bentuk ekspresi simbolik seksualitas adalah merupakan suatu produk dari sistem pandangan dunia. Feodalisme, adalah suatu contoh ideologi yang sangat memengaruhi bentuk-bentuk tindakan yang dikenakan terhadap perempuan dan juga memengaruhi hubungan laki-laki dan perempuan. Keberadaan suatu ideologi dapat dilihat pada konsep-konsep yang sangat umum digunakan, seperti 'perempuan yang lemah' dan '*kanca wingking*'. Perempuan selalu kelihatan seperti gadis, harus menjadi sosok yang sesuai dengan selera suami, seperti juga selera pasar sekarang. Hal ini sesuai dengan ungkapan informan berikut ini:

"Saya memilih tubektomi, supaya terhindar dari akibat sampingan alat kontrasepsi. Pil, susuk dan suntikan dapat mengakibatkan badan menjadi gemuk. Kegemukan akan mengakibatkan kasih sayang suami berkurang dan bahkan bisa diceraikan."

Ungkapan penegasan kekuasaan laki-laki muncul setelah terjalin rasa saling percaya antara peneliti dan informan mengenai masalah seksualitas. Timbul keberanian untuk melakukan operasi tubektomi dibandingkan suami yang melakukan operasi vasektomi dengan harapan untuk mencegah suami

melakukan tindakan menyimpang secara seksual. Stereotipe yang ada dalam persepsi mereka tentang seksualitas ini dikembalikan kepada peneliti. Hal ini terungkap dari wacana yang diutarakan informan berikut ini: "Lebih baik saya yang melakukan operasi steril (tubektomi) daripada suami saya. Kalau suami saya yang melakukan steril saya malah merasa kuatir."

Sementara, feodalisme juga merupakan suatu ideologi yang memengaruhi bentuk-bentuk tindakan yang dikenakan terhadap perempuan dan tipe hubungan laki-laki dan perempuan. Misalnya, konsep perempuan sebagai '*konco wingking*'. Ini semua merupakan produk suatu ideologi yang memengaruhi batas-batas gerak seseorang dalam kehidupannya. Perempuan sebagai pengikut dan orang yang melayani kepentingan laki-laki, termasuk di dalamnya seksualitas.

Kesimpulan

Subjek dalam penelitian ini adalah akseptor tubektomi, sehingga asumsi dasarnya adalah mereka bertindak melakukan operasi melalui tahapan mengerti, mencari makna tentang objek tersebut, kemudian memutuskan tindakan itu '*self indication*'. Transformasi dari peneliti mengenai makna bukan dari rerata atau simpang-bakunya melainkan makna dari pengungkapan esensinya. Dari data yang dituturkan, dicari kesamaan secara individual termasuk kemungkinan determinasinya, yang diperlukan untuk menemukan makna serta apa keberartiannya bagi hidup manusia, terutama hubungan perempuan dan laki-laki dalam seksualitas.

Seksualitas itu sendiri di samping suatu fenomena umum seperti biologis fisik, juga selalu merupakan bentuk interaksi sosial. Karena suatu bentuk interaksi sosial merupakan hasil konstruksi, maka hubungan seksual adalah refleksi nilai-nilai masyarakat, negara dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan menerima seksualitas laki-laki, sementara pengunggulannya melalui semesta pengalaman tentang seksualitas itu sendiri. "Laki-laki tidak boleh steril (vasektomi) nanti malah mengkhawatirkan" adalah tuturan akseptor tubektomi yang mengandung subordinasi seksualitas perempuan. Bahkan, dominasi seksualitas laki-laki juga dilegitimasi melalui wacana "kasihan kalau suami steril nanti kalau saya meninggal dan dia kawin lagi suami tidak bisa punya anak lagi". Dari ungkapan itu, kesadaran mereka belum sampai pada kematangan menafsirkan masalah, penjelasan sebab-akibat, dan keterbukaan

terhadap pembaharuan. Mereka belum melihat kesenjangan kaum penindas dan kaitannya dengan agen-agenya. Dalam melakukan tindakan, ada kecenderungan mereka akan secara aktif memenuhi tuntutan kaum penindas.

Membiarkan dirinya dalam situasi yang terus-menerus tertindas, berarti mereka mengalami masa 'kritis'. Masa kritis ini dapat digambarkan sebagai seorang pasien yang sedang mengalami kritis, yakni dalam keadaan koma. Jadi, dalam konteks kritis ini, manusia harus mengambil keputusan yang kritis dan keputusan itu tentu akan membawa pada situasi penolakan/kutukan dan penerimaan/keselamatan.

Dalam keluarga Jawa yang menganut konsep bapak, dengan mengadopsi ajaran Ki Hajar Dewantoro (Shiraishi 2001) dengan istilah '*tut wuri handayani*', juga turut menyumbang ketertindasan perempuan. Semua urusan cara kontrasepsi diserahkan kepada perempuan sama dengan pelajar yang diberi kebebasan berkreasi, bahkan juga kepada petugas. Suami hanya mengawasi dari belakang, namun '*tut wuri handayani*' juga mengisyaratkan adanya mata yang selalu mengawasi dan siap menghukum. Hukumannya pun bukan "ini adalah hukuman yang kamu terima" tetapi "itu adalah tindakan yang pantas kamu lakukan".

Daftar Pustaka

- Blumer, H. (1969) *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. New York: Prentice-Hall, Inc.
- Foucault, M. (1997) *Seks & Kekuasaan. Sejarah Seksualitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Illich, I. (1982) *Gender*. London: Marion Boyars Publishers, Ltd.
- Merton, R.K. (1967) *On Theoretical Sociology*. New York: The Free Press.
- Muhadjir N. (1992) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Ongkhokham (1991) Kekuasaan dan Seksualitas. Lintasan Sejarah Pra dan Masa Kolonial. *Prisma 7 (issue number): page*.
- Rubin, G. (1984) Thinking Sex: Notes for a Racial. Theory of the Politics of sexuality. Dalam: C. Vance (ed). *Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality*. London: KRP.
- Shiraishi, S.S. (2001) *Pahlawan-Pahlawan Belia. Keluarga Indonesia Dalam Politik*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Spradley, J.P. (1980) *Participant Observation*. Fort Worth: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Suryakusuma, J.I. (1981) Wanita dalam mitos, realitas dan emansipasi. *Prisma 7 (issue number): page*.
- Weeks, J. (1981) *Sex Political Society. The Regulation os Sexuality Since 1800*. London: Longman.